

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional																		
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	7,48	BPS	%	7,94	8,25	7,94	7,64	8,14		8,6			kab
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan																		
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan	Meningkat menjadi 95%	95	Dinkes	%	91	92	82,7	92	76,5	92	83,6			belum tercapai
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5	PM	Disperinaker	%	71	78	78	80	60					
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada	Meningkat menjadi 17,12%	-	Dinsos	%	6,5	7	4	8	4,5	1257	1257			tercapai
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta)	Menurun menjadi 2,8 juta	1.449.070	Dinsos	Jiwa	58.719	58.940	28.858	58.940	38.547	70.544	70.339			Tercapai
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro																		
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2019 menjadi	Meningkat menjadi 70%	PM	DINKES	%	98,62	98	98	99	41,6	100	99,41			belum tercapai
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk	Meningkat menjadi 63%	PM	DINKES	%	100	100	100	100	14	100	100			tercapai
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan	Meningkat menjadi 65%	PM	DP3AKB	%	0	0,5	0,5	2	0,5	100	91,7			blm tercapai
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2019 menjadi 100%	Meningkat menjadi 100%	PM	DINKES	%	0	0,5	0,5	2	0,5	100	91,7			blm tercapai
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2019 menjadi 100%	Meningkat menjadi 100%	PM	DINKES	%	0	0,5	0,5	2	0,5	100	91,7			blm tercapai
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat	Meningkat menjadi 18,6 juta	PM	PERIKAMTRU	%	69,18	8	9,99	8	9,99					
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun	Meningkat menjadi 94,78%	PM	DISDIKBUD	%	98,22	99	96,49	99	102,83	100	102,69			
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada	Meningkat menjadi 82,2%	PM	DISDIKBUD	%	83,8	84	95,69	85	89,25	100	93,37			
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Sederajat pada	Meningkat menjadi 91,63%	PM	BUKAN KEWENANGAN	%										
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terendah pada tahun 2019 menjadi	Meningkat menjadi 77,4%	PM	DISKDUKCAPIL	%	64,11	70	79,93	75						
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terendah pada tahun 2019	Meningkat menjadi 100%	PM	Dinsos	%										Tidak ada Data (PLN)
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.																		
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	BPBD	Jiwa	N/A	15573	15573	15573	15573	15573	20949			
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko	Meningkat menjadi 39 daerah	PM	BPBD	Jiwa	2	5	5	5	5	8	8			
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun	Meningkat menjadi 151 ribu	PM	BPBD	Jiwa										
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Tarlasannya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Meningkat menjadi 81,5 ribu	PM	BPBD	Jiwa										
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6	Menurun menjadi 118,6	36	BPBD	Indeks risiko	183,52	183,52	183,52	183	181,98	181,91				
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	BPBD	ribu Rp	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat Provinsi Jawa Tengah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat Kab Tega	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	1	BPBD	dokumen	1	1	1	9	1	9	9			
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi																		
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	Bappedalitbang	Rp	369.843.032	266665715		272587331		0	0			
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	Disdikbud	Rupiah fungsi Pendidikan (Ribu)	207.884.767	76.166.123	72.163.183	72.523.648	70.066.293	124.384.569.487	136.749.447.300			
						PM	Dinkes	Rupiah fungsi Kesehatan (Ribu)	157.342.665	185652418		192932813		354.311.759.000	354.311.759.000	tercapai		
						PM	Dinsos	Rupiah fungsi Perlindungan Sosial (Ribu)	4.615.600	4847174		7130870		1.267.800.000	1.203.184.000	Tercapai		
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan																		
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun																		
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	Dis KP Tan	%										

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL																		
KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Menurun menjadi 17%	PM	DINKES	gr/kapita/hrkk al/kapita/hr										
2.1.2.*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	Dis KP Tan	%										
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada	Menurun menjadi 8,5 %	PM	Dis KP Tan	%	37,21	35	30	34	N/A					
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula																		
2.2.1.*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	22	DINKES	%	20	20	5,9	20	5,1	21,1	6,1	belum tercapai		
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	16	DINKES	%						21,1	11,78	belum tercapai		
2.2.2.*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DINKES	%						7,8	7,05	belum tercapai		
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada	Menurun menjadi 28%	22	DINKES	%						25	10,4	belum tercapai		
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013:	Meningkat menjadi 50%	60	DINKES	% (0-6 bln)						45	77,6	tercapai		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5	88,8	Dis KP Tan	Skor	N/A	85	86	86	86,5	87	91,7			
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pembalaka dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non																		
2.3.1.*	Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	Dis KP Tan	Rupiah/ tenaga kerja										
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia																		
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup																		
3.1.1.*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per	Menurun menjadi 306	81	DINKES	100.000 / KH	48,2	44,54	44,54	42	14	47	118	belum tercapai		
3.1.2.*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%)	Meningkat menjadi 95%	100	DINKES	%						97	99,52	tercapai		
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85 %	100	DINKES	%						97	99,41	tercapai		
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000																		
3.2.1.*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	10,43	DINKES	1.000/KH	8,39	6,9	6,9	7,97	6,7	7,7	5,6	belum tercapai		
3.2.2.*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DINKES	1.000/KH	7,86	7,47	6,1	7,1	7,1	7,7	4,2	belum tercapai		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun	Menurun menjadi 24	7,8	DINKES	1.000/KH	7,86	7,47	6,1	7,1	7,1	6,9	5,1	belum tercapai		
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun	Meningkat menjadi 95%	-	DINKES	%						100	100	tercapai		
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya																		
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi	<0,5%	-	DINKES	%						0,3	0,3	tercapai		
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada	Menurun menjadi 245	-	DINKES	%						34,85	30,26	belum tercapai		
3.3.3.*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,05	DINKES	per 1000 orang	0	0	0	0	0	<1	<1	tercapai		
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun	Meningkat menjadi 300	35	DINKES	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	40	DINKES	%	100	100	100	100	100	100	100	tercapai		
3.3.5.*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DINKES	Juta orang (Filariasis)	14,9	<45	1,47	<45	3,7	0	0	tercapai		
3.3.5 (a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34	Meningkat menjadi 34 provinsi	-	DINKES	provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.	-	DINKES	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0		
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan																		
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun pada	Menurun menjadi 5,4%	-	DINKES	%						N/A	N/A	N/A		
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan	Menurun menjadi 24,3%	-	DINKES	kasus						76	80	tercapai		
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia ≤ 18	Menurun	PM	DINKES	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PM	12%			
3.4.2.*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DINKES	Kematian per 100.000						0	1	belum tercapai		
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun	Meningkat menjadi 280	35 (100%)	DINKES	Kab/Kota						0	0	0		
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan																		

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL																	
KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DINKES, RSUD	Orang	0	10	6	10	7	N/A	N/A	N/A	
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DINSOS	Orang	N/A	10	4,5	10	6	110	110	tercapai	
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar.	Meningkat menjadi: Di dalam panti 210; di luar panti 4.319	-	DINSOS	Orang	45	46	26	47	25	29	29	tercapai	
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Meningkat menjadi 85	-	DINSOS	Lembaga	0	1	1	1	0	0	0		
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkenalinya laju prevalensi	Menurun menjadi angka	-	DINSOS	%	13,2	13	6	12,9	7		29	tercapai	
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DINKES	%						N/A	N/A	N/A	
Target 3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas																	
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	DISHUB	orang			170 orang		134 orang		140 orang		
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional																	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%	PM	DP3AKB	%						PM	NA		
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan dibawah pada tahun 2019 menjadi	Meningkat menjadi 65%	PM	DP3AKB	%	203.349	212.345	205.524	221.341	208.917	175.747	188.121		
3.7.1.(b)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Meningkat menjadi 23,5%	30	DP3AKB	%	29,65	29,85	29,49	31,28	29,49	32,6	26,77		
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 49)	Menurun menjadi 38	-	DP3AKB	Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun)	N/A	15	15	14,75	N/A	PM	28,7		
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012-2,6)	Menurun menjadi 2,28	2,18	DP3AKB	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	N/A	2,45	2,24	2,44	N/A	2,26	2,23		
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang																	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmet need pelayanan	Menurun menjadi 9,91%	PM	DINKES	%						N/A	N/A	N/A	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DINKES	%						92	83,6	belum tercapai	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada	Meningkat menjadi minimal 95%	95	DINKES	%	90,8	91	82,7	92	76,5	92	83,6	belum tercapai	
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat																	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	DINKES							N/A	N/A	N/A	
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kelulusan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua																	
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DINKES							100	100	tercapai	
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil																	
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DINKES	Tenaga kesehatan/ 1000 penduduk						69	82,7	tercapai	
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua																	
Tujuan 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif																	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DISDIKBUD	%									
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun	Meningkat menjadi 84,2%	100	DISDIKBUD	%	92,12		92,28		92,85		97,58		
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun	Meningkat menjadi 81%	100	DISDIKBUD	%	70,28		72,34		71,05		79,69		
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun	Meningkat menjadi 84,6%	100	DISDIKBUD	%									
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun	Meningkat menjadi 114,09%	PM	DISDIKBUD	%	105,62		104,40		109,66		108,95		
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019	Meningkat menjadi 106,94%	PM	DISDIKBUD	%	102,95		119,78		132,78		117,16		
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun	Meningkat menjadi 91,63%	SMA: 28,36 SMK: 49,46	BUKAN KEWENANGAN	%									
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada	Meningkat menjadi 8,8 tahun	PM	DISDIKBUD	Tahun	6,70		6,86		6,98		6,99		
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar																	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkat menjadi 77,2%	PM	DISDIKBUD	%									

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.		
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas																			
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi	Meningkat menjadi 91,63 %	SMA: 28,36 SMK: 49,46	BUKAN KEWENANGAN	%											
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 %	Meningkat menjadi 36,73 %	PM	BUKAN KEWENANGAN	%											
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan																			
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	DISKOMINFO	N/A			N/A				N/A				
						PM	DISKOMINFO	48,63			58,75				65,78				
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan																			
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Meningkat	PM	DISDIKBUD	%											
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi																			
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15	Meningkat menjadi 96,1%	PM	DISDIKBUD	%			99				96,67				
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur [1]15-24 tahun dan umur [2]15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa	Meningkat	PM	DISDIKBUD	%											
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua																			
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	DISDIKBUD	(a) % (b) % (c) % (d) % (e) % (f) % (g) %											
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil																			
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	DISDIKBUD	%											
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan																			
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun																			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada	bertambah sebanyak 16	PM	DP3AP2KB	Jumlah Kebijakan	0		0				1	PM	0		
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.																			
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DP3AP2KB	%							PM	0,007			
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	PM	DP3AP2KB	%							PM	0,009			
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DP3AP2KB	%	71,21		70				50,88				
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkat menjadi 70%	PM	DP3AP2KB	%	N/A		14,75				100				
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan																			
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	DP3AP2KB	% (sebelum 15 th) % (sebelum 18 tahun)	N/A		0				N/A				
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun	Meningkat menjadi 21 tahun	PM	DP3AP2KB	th							PM	20			
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun	PM	DP3AP2KB	Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun)							PM	28,7			
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun	Meningkat menjadi 91,63%	SMA: 28,36 SMK: 49,46	BUKAN KEWENANGAN	%											
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat																			
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat	19,1	DP3AP2KB	%	20; 26, 75		15; 25				24; 30,54				
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil	Meningkat	PM	DP3AP2KB	%	20; 26, 75		15; 25				24; 30,54				
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut																			
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DP3AP2KB	%							PM				

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%	10,75	DP3AP2KB	%	14,22	13,77	15,72	13,79	13,97	15,07	14,73			
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi	Meningkat menjadi 85%	PM	DP3AP2KB	%						PM				
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan																		
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	DISKOMINFO	%	60,47					61,66		62,76		
Tujuan 6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak																		
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua																		
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	PM	Disperkim	%	86,23	87	57,64%	88	61,09%		63,85%			
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	69,95	Disperkim	m3/detik	PM	PM		PM						
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	-	Disperkim	%	20,93%	21,69%	22,48%	22,45%	22,62%	23,21%	32,14%			
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetulkan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan																		
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	DINKES	%						68	56	blm tercapai		
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	PM	DINKES	% (Akses aman sanitasi air limbah domestik)	0	0,5	0,5	2	0,5	100	100	tercapai		
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	PM	DINKES	desa/kelurahan	0	1	1	6	1	100	100	tercapai		
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	7,668	DINKES	desa/kelurahan	0	1	66	6	287	100	100	tercapai		
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	35	Disperkim	kab/kota	1	1	1	1	1	1	1			
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	Disperkim	%	0,23	0,25	0,23	0,27	0,23	0,3	0,29			
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global																		
6.3.1 (a)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	-	DLH	Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1	1	1		
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DLH	%	N/A	10	N/A	10	N/A	850	942			
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju	Meningkat	-	DLH	Sungai						1	N/A			
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air																		
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang	ada	635	DLH	Lokasi						-	N/A			
6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	ada	-	DLH	PM						-	N/A			
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkat, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat																		
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	PM	DLH	RPDAST	1	1	N/A	1	N/A	-	N/A			
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Updating dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah	8 WS	-	DPU	stasiun										
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	8 WS	PM	DPU	Wilayah Sungai										
6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Pemulihan kesehatan DAS melalui peningkatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Komunitas (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat	-	-	DLH	Ha						2653,9	2653,9			
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)	PM	DPU	Wilayah Sungai										
6.5.1 (g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan:	ada	-	DPU	Lembaga										
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Cilungur, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas	15 DAS Prioritas	-	DPU	DAS										
6.5.1 (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	15 DAS Prioritas	-	DPU	DAS										
Target 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau																		
6.6.1 (a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019.	15 danau prioritas	-	DPU	Danau										

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.6.1 (b)	Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%	Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%	Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%	Meningkatnya 15 danau yang pendangkalanannya kurang dari 1% pada tahun 2019	15 danau prioritas	-	DPU	Danau										
6.6.1 (c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau	15 danau prioritas	-	DPU	Danau										
6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	Mengurangi luas lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH sebesar 5,5 juta hektar pada tahun 2019	5,5 juta ha (skala nasional)	PM	DLH	ha					1781,92	1781,92				
6.6.1 (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Cilungung, DAS Citarum, DAS	15 DAS Prioritas	8	DPU	DAS Prioritas										
Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern																		
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern																		
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 96,6%	100	BPS	%										nasional
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019	Meningkat menjadi 1.200 KWh	921,69	BPS	KWh										nasional
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014- 200 ribu)	1,1 juta sambungan rumah tangga	-	BPS	kWh										nasional
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%						85,82				nasional
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global																		
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	10-16%	15,96	BPS	%							12,16			nasional
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat																		
7.3.1*	Intensitas energi primer	Intensitas energi primer	Intensitas energi primer	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	-	BPS	SBM (Setara Barrel Minyak)										nasional
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan																		
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang																		
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%										
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita.	PDRB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto	Meningkat menjadi lebih	45,35	BPS	Juta Rupiah						23,21008187				kab
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya																		
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Meningkat	PM	BPS	%						1,59				jateng
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha makro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan																		
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%						50,57				jateng
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal	51%	PM	BPS	%						39,62				Jateng
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%						91,89				Jateng
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya																		
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	Rp						13072				jateng
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	4	BPS	%						9,97				kab
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	BPS	%						7,23				jateng
Target 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial menurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan																		
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NFET)	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NFET)	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NFET)	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja	Meningkat	PM	BPS	%						20,32				jateng
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal																		
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014- 4,2%)	Meningkat menjadi 8%	3,25	BPS	%						-	-	-	-	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	1.118.957	DISPORAPAR	orang	487	500	3.247	587	137.000	150.000	0.000	Sangat Rendah		
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	62.748.973	DISPORAPAR	orang	1.126.560	1.142.587	1.186.630	1.182.587	162823	552.687	483.642	Tinggi		
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DISPORAPAR	Triliun Rupiah (Kurs Rp12.000)										ini yang bisa jawab BAPPENDA karena sektor pariwisata bukan retribusi di obyek saja
8.9.2*	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DISPORAPAR	%										Untuk rumus belum tahu, akan tetapi jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata ± 435 orang yang terdaftar
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua																		
8.10.1*	Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk di desa	Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk di desa	Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk di desa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	Bag. Ekbang Setda	Unit	5,08	5,08	0,0004	5,08	0,0004					
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	Menurun (mendekat)	-	Bag. Ekbang Setda	Km	3	3	1	3	1					
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	Meningkat	-	Bag. Ekbang Setda	%										
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi																		

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL																		
KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua																		
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Mantap Jalan kabupaten	(tidak ada dalam lampiran Perpres	Meningkat	-	DPU	%	62,42	62,42	68,01	72,88	81,11	74,88	82,5	Tercapai		
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol	Panjang pembangunan jalan tol di Jawa Tengah	Panjang pembangunan jalan tol di Kab. Tegal	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014:	1000 Km (skala nasional)	PM	DISHUB	km										
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah	Panjang jalur kereta api di Kab. Tegal	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun	Bertambah 3.258 km	1199,73	DISHUB	km										
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	Jumlah bandara.	Jumlah bandara.	Meningkatnya jumlah bandara	Meningkat	-	DISHUB	unit	0	0	0	0	0					
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Meningkatnya jumlah dermaga	Meningkat	-	DISHUB	unit	0	0	0	0	0					
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah	Jumlah pelabuhan strategis di Kab. Tegal	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24	24 pelabuhan (skala nasional)	PM	DISHUB	lokasi	0	0	0	0	0					
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang																		
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%							33,41		jateng	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	3	BPS	%							3,39		nasional	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%									nasional	
Target 9.3 Meningkatkan akses terhadap infrastruktur skala kecil, khususnya di negara kurang berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar																		
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DISDAKOP UKM	%										
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	DISDAKOP UKM	%										
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing																		
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DLH	%	10	10	N/A	10	N/A	-	N/A			
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.	Menurun menjadi mendekati 26%	-	DLH	%	10	10	80	10	N/A	-	N/A			
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan																		
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	BPS	%										
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030																		
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	BPS	%	68,12	69,12	95,12	70,12	N/A					
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%	68,12	69,12	72,4	70,12	N/A					
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%	68,12	69,12	45,57	70,12	N/A					
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara																		
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional																		
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini.	Koefisien Gini	Koefisien Gini pada tahun 2019	Menurun menjadi 0,36	0,3	BPS	Indeks							0,3215		kab	
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok usia	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	7,48	BPS	%										
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	80 Kabupaten (skala nasional)	-	-	BPS	kab										
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	-	-	DISPERMASDES	desa										
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Meningkat	100	DISPERMASDES	desa (pendamping)	281 desa	50.000	281 desa	90.000						
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	BPS	%									nasional	
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi	Menurun menjadi 14%	9,17	BPS	%							26,68		nasional	
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya																		
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	BPS	%							18,41		jateng	
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut																		
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan	Meningkat menjadi 87	PM	KESBANGPOL	skor	N/A	70	N/A	71	N/A	71	N/A			
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	-	KESBANGPOL	Kebijakan/ Dokumen										
Target 10.4 Meniadakan kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar																		
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kepsertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK	PM	DISPERINAKER	%	71	78	78	80	60					
Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan																		
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh																		
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun	3,7 juta rumah tangga	PM	Disperkim	%	87,74%	88,74%	89,88%	89,74%	90,40%	90,74%	90,90%			
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019	-	-	Disperkim	Kawasan Perkotaan	15	15	15	15	15	15	15	15		
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	-	Disperkim	Kota Sedang & Kota Baru	1	1	1	1	1	1	1			

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua																		
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	-	DISHUB	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	1,17%			
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Meningkatnya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2030.	ada	-	DISHUB	Kota Besar	0	0	0	0	0	0	0			
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganannya, pemukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara																		
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	100	Bappedalitbang	% (Partisi-pasi Masya-rakat dlm Musren-bang)	30	30	30	30	30	20	16			
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	-	Bappedalitbang	Jumlah Lembaga	0	0	0	0	0	0	0			
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia																		
11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city).	ada	-	Disperkim	Kota Pusaka	0	0	0	0	0					
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan																		
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	BPBD	Jiwa	N/A	15573	15573	15573	15573	15573	20949			
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2030.	Menurun menjadi 30%	-	BPBD	Indeks	184,41	183,52	183,52	183,52	183	181,98	181,91			
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya jumlah lokasi penataan penanggulangan risiko bencana.	Meningkat menjadi 39 daerah	-	BPBD	Desa tangguh	2	5	5	5	5	8	8			
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	7	-	BPBD	Sistem peringatan dini	N/A	N/A	1	N/A	3	N/A	3			
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	BPBD	ribu Rp	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.250.000.000			
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota																		
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80%	93	-	DLH	% (smp-pah ter-angkut)						100%	75%			
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water green waste.	Meningkat/ada	35	DLH	Kota hijau						25 DMS	25 DMS			
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manusia dan penyandang difabilitas																		
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan.	Meningkat/ada	-	DLH	Kota hijau						262 RTH	262 RTH			
11.7.2 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	BAG. HUKUM SETDA	%										
Target 11.b Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030																		
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi penanggulangan risiko bencana.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi penanggulangan risiko bencana.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi penanggulangan risiko bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat/ada	-	BPBD	%	100	100	100	100	100	100	100			
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	1	BPBD	dokumen	1	1	1	9	1	9	9			
Tujuan 12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan																		
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan																		
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	DLH	peserta Proper (perusaha an)	N/A	15	2	15	2	2	2			
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	PM	DLH	ton/th (Limbah B3 yang terkelo-la)	N/A	5,00	N/A	5	43.500	44.000	34.734			
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali																		
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasiva	20 ton per hari (skala nasional)	PM	DLH	Ton(sampah yang diangkut)	N/A	7	N/A	7	N/A	30.000	28.371			
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan trnasnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka																		
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen)	Meningkat	25	DLH	perusahaan	1	1	1	1	1	0	0			
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional																		
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam	Meningkat	-	DISPERINAKEK	Produk Ramah Lingkungan										
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam																		
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	Disperkim	Fasilitas Publik	N/A	PM	N/A	PM	18	PM	18			
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan																		
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara																		
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Kabupaten	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	1	BPBD	dokumen	1	1	1	9	1	9	9			
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	BPBD	Jiwa	N/A	15573	15573	15573	15573	15573	20949			
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional																		

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL																		
KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).	ada	PM	DLH	dokumen										
Tujuan 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan																		
Target 14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia																		
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 (2015: 17,3 juta Ha).	Meningkat menjadi 20 juta ha (skala nasional)	-	Dinas Perikanan	Jt Ha									Sejak tahun 2016 menjadi kewenangan Provinsi	
Target 14.6 Pada tahun 2030, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization																		
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Terkendalanya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU).	Meningkat menjadi 87%	-	Dinas Perikanan	%	25	30	30	30	30	10	4,16	64,16		
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar																		
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses perikanan skala nelayan	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses perikanan skala nelayan	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses perikanan skala nelayan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	Dinas Perikanan	lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	20.000	Dinas Perikanan	orang	125	500	577	500.000	0	250	250			
Tujuan 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan																		
Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional																		
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan hutan.	Meningkat	31,02	DLH	%						25,34	25,34			
Target 15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global																		
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	-	DLH	Hektar	N/A	10	N/A	10	N/A					
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha).	Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)	-	DLH	Ha										
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	35,38	DLH	KPH										
Target 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekerangan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi																		
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Provinsi Jawa Tengah	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Provinsi Jawa Tengah	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan	25	DLH	%	N/A	0,001	N/A	0,002	N/A						
Tujuan 16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh																		
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun																		
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	SATPOL PP	Kasus	2	0	0	0	0	0				
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	SATPOL PP	Kematian/100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0			
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	PM	SATPOL PP	%	0,000147857	0	0,0000044	0	N/A	0	N/A			
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan	Meningkat	PM	SATPOL PP	%	N/A	100	N/A	100	N/A	100	N/A			
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penysiksaan terhadap anak																		
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DP3AP2KB	%	0	2	0,008	2	0,001	PM	0,008			
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun	Menurun	12,36	DP3AP2KB	%						PM	0,009			
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	-	DP3AP2KB	%						PM	0,007			
Target 16.3 Mengalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua																		
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BAG. HUKUM SETDA	%	60	81	19,3	90	37,5					
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi	-	-	BAG. HUKUM SETDA	Orang	0	0	N/A	0	N/A	10	10			
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dalam segala bentuknya																		
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi	Meningkat menjadi 4,0	3,5	INSPEKTORAT	Angka	N/A	2,5	N/A	2,6	N/A					
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat																		
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Kabupaten:60%, Kota: 66%	Meningkat menjadi: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten/Kota: 60%	100	BPKAD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Meningkat menjadi: 85%, Provinsi: 85%, Kabupaten/Kota: 50%	85	BAG. ORGANISASI	%	57,01	61,61	60,1	63,61	61,36	65,61	63,28			(n-1)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Meningkat menjadi 80%	100	BAG. PBJ SETDA	%	100	100	100	100	100	100	27,21			
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun	Meningkat menjadi: 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	80	BAG. ORGANISASI SETDA	%	45,25	45,25	50,1	63,69	64,19	64,21				(n-1)

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.	
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian; 100%, Lembaga; 100%, Provinsi; 100%, Kabupaten/Kota; 80% pada tahun	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	-	BAG. ORGANISASI SETDA	%	84,86	85	82,25	85	81	79,89	79,89	(evaluasi dari Ombudsman)	niali evaluasi ombusmen th 2021	
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan																		
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat	19,1	DP3AP2KB	%	20	15	24	15	24					
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	Meningkat	PM	BKD	%	26,75	25	30,54	25	N/A					
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi.	Meningkat menjadi 71	PM	KESBANGPOL	Indeks	N/A	79	72,17	79	72,17	79	72,17			
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	PM	KESBANGPOL	Indeks	N/A	70	72,17	70	72,17	70	72,17			
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik	Meningkat menjadi 68	PM	KESBANGPOL	Indeks	N/A	68	72,17	68	72,17	68	72,17			
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran																		
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%	-	DISDUKCAPIL	%	84,48	85	89,51	86	88,71					
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan	Meningkat menjadi 77,4%	PM	DINSOS	%	N/A	50	N/A	50	N/A					Tidak ada Data (Disdukcapil)
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi 85%	Meningkat menjadi 85%	PM	DISDUKCAPIL	%	69,46	85	78,88	80	93,1	85	94,88			
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran																		
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Terukurinya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan	ada	-	DISKOMINFO	OPD	48	48	48	48	48	48	48			
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	85	PM	DISKOMINFO	%	100	100	0,03	100	0	100	0			
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID	Meningkat	PM	DISKOMINFO	PPID	NA	48	0	48	0	48	0			
Target 16.b Mengalokasikan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan																		
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	PM	BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan/ Dokumen										
Tujuan 17. Mengutamakan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global																		
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya																		
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	31.505.807.166.000	BPS	Rp										
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas	Di atas 12%	PM	BPS	%						0.11/ainnya	1.08/cukai			
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	100	BPKAD	%										
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global																		
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 rumah tangga dan 30% rumah tangga dan 30%	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30%	-	BPS	%										
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband)	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi;	-	BPS	%	68,12	69,12	95,12	70,12	N/A					
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi																		
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%	68,12	69,12	95,12	70,12	N/A					
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Kabupaten Tegal (2019: 100%)	100%	-	DISKOMINFO	%	N/A		N/A		N/A	99				
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.				BPS	%										
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).				BPS	Metadata										
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpelih yang relevan dengan target.	Persentase indikator SDGs terpelih yang relevan dengan target.	Persentase indikator SDGs terpelih yang relevan dengan target.				BPS	%										
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2030																		
17.11.1.(a)	Pertumbuhan eksporproduk non migas	Pertumbuhan eksporproduk non migas	Pertumbuhan eksporproduk non migas	Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: 5%)	Meningkat 5%	7,205	BPS	Juta US \$										
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama																		
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan	ada	-	Bappedalibang	Dokumen berisi daftar proyek KPBU	0	1	0	0	0	0	0			

MATRIK 1. INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2020

KABUPATEN TEGAL

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) RINGKASAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk persiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	ada	-	Bappedalitbang	Alokasi	0	0	0	0	0	0	0		
Target 17.18 Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terolah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi																	
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%									jateng
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%									jateng
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSa)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSa)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSa)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	Metadata									nasional
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs Jateng terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs Jateng terpilah yang relevan dengan target	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	BPS	%									nasional
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang																	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	-	DISDUKCAPIL	Data Registrasi									

Keterangan Status Capaian

- Tercapai
- ▲ Perlu Perhatian / Hampir Tercapai
- ▼ Tidak Tercapai

Keterangan Target: **N.A** : Jika tidak terdapat data
PM : Jika target tidak ditentukan

N.A : Jika tidak terdapat data
PM : Jika target tidak ditentukan